



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA AKSI 2020



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM.MENLHK.GO.ID

FIGHT AGAINST
X-CRIME



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
KATA PENGANTAR	III
BAB I PENDAHULUAN	1
I.I MAKSUD DAN TUJUAN	1
I.II LANDASAN HUKUM	2
BAB II RENCANA AKSI	3
BAB III PENUTUP	7
BAB IV LAMPIRAN-LAMPIRAN	8
LAMPIRAN 1 PROGNOSIS CAPAIAN PROGRAM PER TRIWULAN DITJEN GAKKUM KLHK TA 2020;	9
LAMPIRAN 2 PROGNOSIS CAPAIAN KEGIATAN PER TRIWULAN SETDITJEN GAKKUM KLHK TA 2020;	10
LAMPIRAN 3 PROGNOSIS CAPAIAN UNIT KEGIATAN PROGRAM DAN EVALUASI TA 2020;	10
LAMPIRAN 4 PROGNOSIS CAPAIAN UNIT KEGIATAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS TA 2020;	11
LAMPIRAN 5 PROGNOSIS CAPAIAN UNIT KEGIATAN KEUANGAN DAN UMUM TA 2020;	12
LAMPIRAN 6 PROGNOSIS CAPAIAN UNIT KEGIATAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TA 2020;	13



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel. 1 Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020	3
Tabel. 2 Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020	4
Tabel. 3 Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan lingkup Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5
Unit Kegiatan Program dan Anggaran	5
Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	6
Unit Kegiatan Keuangan dan Umum	6
Unit Kegiatan Hukum dan Kerjasama Teknis	6



KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2020 kedepan lingkup Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK di dalam Efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun tahun selanjutnya.

Jakarta, 24 Februari 2020

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK,

ttd

Dr. Drs. Sugeng Priyanto. M,Si.
NIP. 19630705 198303 1 001



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 adalah dokumen rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama pencapaian Kegiatan Dukungan Manajemen di dalam Pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020.

I.I MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2020 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.



I.II LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

- Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.82 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.1/SET/PROEV/SET.1/ 12/2019 tentang Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;



BAB II RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020, telah disampaikan bahwa kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel berikut:

Rencana Aksi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020, sebagai berikut;

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan meningkat	50 Persen
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah Kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	219 Kasus P-21
Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1.700.000 Hektar

TABEL 1 Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020



Adapun kegiatan lingkup Eselon II di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	100 Operasi
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	110 Operasi
Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	40 Kasus
	Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan	6 Kasus
Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani	910 Perusahaan
	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	90 Perusahaan
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang
Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	173 Kasus P-21
	PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	210 Orang

TABEL 2 Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum LHK



Adapun Sasaran Kegiatan dan Unit Kegiatan lingkup Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PHLHK	75 Poin
	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PHLHK	3 Poin
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PHLHK yang Tertib dan Akuntabel	1 Laporan

TABEL 3 Rencana Aksi Kegiatan Prioritas Bidang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	TARGET 2020
A. BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI		
Tersedianya Dokumen Rencana Program Ditjen. Gakkum LHK	Jumlah Dokumen RENJA Ditjen. Gakkum LHK	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen RENJA Unit Kerja Gakkum LHK	10 Dokumen
	Jumlah Dokumen RAN Aksi Ditjen. Gakkum LHK	10 Dokumen
	Jumlah Dokumen Renstra Ditjen. Gakkum LHK	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Renstra Unit Kerja Gakkum LHK	10 Dokumen
Tersedianya Dokumen Anggaran Ditjen. Gakkum LHK	Jumlah Dokumen RKAKL	6 RKA K/L
	Jumlah Dokumen Revisi RKAKL	12 Dokumen
	Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya	1 Dokumen
	Peraturan Standar Biaya Teknis	1 Dokumen
Terselenggaranya Dukungan Program dan Anggaran Penegakan Hukum LHK	Jumlah bahan kerja pimpinan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12 Laporan
	Raker Penegakan Hukum	2 Laporan
Tersedianya Dokumen Pelaporan Lingkup Ditjen. Gakkum LHK	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen. Gakkum LHK	11 Dokumen
	Jumlah Dokumen Desain SPIP Lingkup Ditjen. Gakkum LHK	10 Desain SPIP
	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Lingkup Ditjen. Gakkum LHK	11 Dokumen
Meningkatnya Cakupan dan Penetrasi Komunikasi dan Kampanye	Jumlah berita media massa mengenai kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada Masyarakat	100 Berita
	Jumlah media kampanye/pameran PHLHK	10 Pameran
Tercapainya Data dan Informasi Penegakan Hukum LHK	Jumlah Satuan Kerja yang terkoneksi dengan system Data dan Informasi terpusat	3 Satuan Kerja
	Jumlah Publikasi melalui Media Sosial Penegakan Hukum (FB, IG, Twitter, Youtube dan Website)	500 Postingan



SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	TARGET 2020
B. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		
Meningkatnya daya saing SDM Ditjen PHLHK	Tersedianya Polisi Kehutanan dalam Mendukung PHLHK;	679 Polisi Kehutanan
	Tersedianya PPLH untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan LH	158 PPLH
	Tersedianya PPNS untuk memenuhi kebutuhan Penyidikan	206 PPNS
	Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya	1.326 Orang
Tersusunnya struktur organisasi tata dan kerja yang proporsional, efektif dan efisien	Terlaksananya Penyempurnaan Ketatatalaksanaan lingkup Ditjen PHLHK;	1 Usulan
	Jumlah UPT Penegakan Hukum yang efektif dan efisien	5 Satuan Kerja
C. BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK		
Tersedianya Rancangan Aturan dan NSPK	Jumlah Rancangan Regulasi terkait Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	3 Dokumen (Draft)
	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	3 Dokumem (Perdirjen)
Tersedianya Rumusan Kajian Hukum	Jumlah Rumusan Kajian Hukum	5 Laporan
Tersedianya bantuan hukum	Jumlah Bantuan Hukum Ditjen PHLHK	5 Laporan (Dataset)
Terselenggaranya Kerjasama Teknis dalam Meningkatkan Efektifitas Kegiatan PHLHK	Jumlah Kerjasama Teknik dalam negeri terkelola	12 Laporan Mitra Kerjasama
	Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola	5 Laporan Mitra Kerjasama
D. BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM		
Meningkatnya Administrasi Keuangan Ditjen PHLHK secara Efektif	Opini WTP untuk Laporan Keuangan	1 Dokumen
	Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai dengan PUU	10 Orang
	Pengelolaan Administrasi Keuangan yang tertib sesuai dengan PUU (zero temuan)	1 Dokumen
Terselenggaranya Pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan	Laporan BMN yang Akuntabel	1 Dokumen
	Identifikasi register aset secara elektronik	1 Dokumen
	Tersusunnya Rencana pengadaan BMN yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat guna	34 Unit
	Jumlah Sarana dan Peralatan LHK terdistribusi di Satuan Kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	1.556 Unit
	Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	1 Dokumen SK
	Penataan Dokumentasi berdasarkan Aplikasi SIK	1 Dokumen
	Terlaksananya Pengelolaan Surat/Dokumen Dinas	1 Laporan
	Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan	1 Laporan



BAB III PENUTUP

Tercapainya sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh kontribusi penuh dari unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya Dukungan Manajemen di dalam penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Dukungan Manajemen di dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta diharapkan agar tujuan program maupun Sasaran Strategis Kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.



BAB IV

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 PROGNOSIS CAPAIAN PROGRAM PER TRIWULAN DITJEN GAKKUM KLHK TA 2020;

Indikator Kinerja Program	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Target 2020	Satuan
	I	II	III	IV		
Persentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan meningkat *	10	15	30	50	50	Persentase *
Jumlah Kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	15	55	68	35	173	Kasus P-21 **
Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	400.000	600.000	1.120.000	880.000	3.000.000	Hektar **

Keterangan :

* = Target pencapaian Non Akumulatif;

** = Target pencapaian Akumulatif (TW I + TW II + TW III + TW IV)



LAMPIRAN 2 PROGNOSIS CAPAIAN KEGIATAN PER TRIWULAN SETDITJEN GAKKUM KLHK TA 2020;

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2020	Satuan
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PHLHK	-	-	-	-	78	Poin*
Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PHLHK	-	-	-	-	3	Level**
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PHLHK yang Tertib dan Akuntabel	-	-	-	-	1	Laporan**

Keterangan :

*Target pencapaian Untuk Nilai SAKIP TA 2019 (T-1),

** Penilaian Nilai Maturitas SPIP Akhir Tahun beserta LK tahun 2020;

LAMPIRAN 3 PROGNOSIS CAPAIAN UNIT KEGIATAN PROGRAM DAN EVALUASI TA 2020;

INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TARGET	SATUAN
Jumlah Dokumen RENJA Ditjen. Gakkum LHK	0	0	0	1	1	Dokumen



Jumlah Dokumen RENJA Unit Kerja Gakkum LHK	10	0	0	0	10	Dokumen
Jumlah Dokumen RAN Aksi Ditjen. Gakkum LHK	10	0	0	0	10	Dokumen
Jumlah Dokumen Renstra Ditjen. Gakkum LHK	0	1	0	0	1	Dokumen
Jumlah Dokumen Renstra Unit Kerja Gakkum LHK	0	0	10	0	10	Dokumen
Jumlah Dokumen RKAKL	0	0	0	6	6	Dokumen
Jumlah Dokumen Revisi RKAKL	6	0	6	0	12	Dokumen
Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya	0	1	0	0	1	Dokumen
Peraturan Standar Biaya Teknis	0	1	0	0	1	Dokumen
Jumlah bahan kerja pimpinan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	3	3	3	12	Laporan
Raker Penegakan Hukum	1	0	0	1	2	Laporan
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen. Gakkum LHK	0	0	0	11	11	Dokumen
Jumlah Dokumen Desain SPIP Lingkup Ditjen. Gakkum LHK	0	0	0	10	10	SPIP
Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Lingkup Ditjen. Gakkum LHK	0	0	0	11	11	Dokumen
Jumlah berita media massa mengenai kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada Masyarakat	25	25	25	25	100	Berita
Jumlah media kampanye/pameran PHLHK	2	3	3	2	10	Pameran
Jumlah Satuan Kerja yang terkoneksi dengan system Data dan Informasi terpusat	1	1	1	0	3	Satuan Kerja
Jumlah Publikasi melalui Media Sosial Penegakan Hukum (FB, IG, Twiter, Youtube dan Website)	125	125	125	125	500	Postingan

LAMPIRAN 4 PROGNOSIS CAPAIAN UNIT KEGIATAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS TA 2020;

INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TARGET	SATUAN
---------------------------------	------	-------	--------	-------	--------	--------



Jumlah Rancangan Regulasi terkait Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	0	0	0	3	3	Dokumen (Draft)
Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	0	0	0	3	3	Dokumem (Perdirjen)
Jumlah Rumusan Kajian Hukum	0	0	0	5	5	Laporan
Jumlah Bantuan Hukum Ditjen PHLHK	1	2	2	0	5	Laporan (Dataset)
Jumlah Kerjasama Teknik dalam negeri terkelola	12	0	0	0	12	Laporan Mitra Kerjasama
Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri terkelola	5	0	0	0	5	Laporan Mitra Kerjasama

LAMPIRAN 5 PROGNOISIS CAPAIAN UNIT KEGIATAN KEUANGAN DAN UMUM TA 2020;

INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TARGET	SATUAN
Opini WTP untuk Laporan Keuangan	0	0	0	1	1	1 Dokumen
Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai dengan PUU	0	0	0	10	10	10 Orang



Pengelolaan Administrasi Keuangan yang tertib sesuai dengan PUU (zero temuan)	0	0	0	1	1	1 Dokumen
Laporan BMN yang Akuntabel	0	0	0	1	1	1 Dokumen
Identifikasi register aset secara elektronik	0	0	0	1	1	1 Dokumen
Tersusunnya Rencana pengadaan BMN yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat guna	0	0	0	34	34	34 Unit
Jumlah Sarana dan Peralatan LHK terdistribusi di Satuan Kerja dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	0	0	0	1.556	1.556	1.556 Unit
Penetapan Standar Sarana dan Prasarana	0	0	0	1	1	1 Dokumen SK
Penataan Dokumentasi berdasarkan Aplikasi SIK	0	0	0	1	1	1 Dokumen
Terlaksananya Pengelolaan Surat/Dokumen Dinas	0	0	0	1	1	1 Laporan
Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan	0	0	0	1	1	1 Laporan

LAMPIRAN 6 PROGNOISIS CAPAIAN UNIT KEGIATAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TA 2020;

INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TARGET	SATUAN
Tersedianya Polisi Kehutanan dalam Mendukung PHLHK;	0	0	0	679	679	Polisi Kehutanan



Tersedianya PPLH untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan LH	0	0	0	158	158	PPLH
Tersedianya PPNS untuk memenuhi kebutuhan Penyidikan	0	0	0	206	206	PPNS
Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya	0	0	0	1.326	1.326	Orang
Terlaksananya Penyempurnaan Ketatatalaksanaan lingkup Ditjen PHLHK;	1	0	0	0	1	Usulan
Jumlah UPT Penegakan Hukum yang efektif dan efisien	5	0	0	0	5	Satuan Kerja



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2020

